Analisis Yuridis Cara-Cara Penagihan

Utang Di Pegadaian

Refky Anwar1, Sri Lestari Poernomo1 &

Dian Eka Pusvita Azis1

1Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden Penulis:

ΩSurel Koresponden: refky.anwar@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to determine and analyze ways of collecting debt and the factors that affect debt collection at Pegadaian. This study uses the Normative-Empirical research method which in this case combines elements of normative law which are then supported by the addition of data or empirical elements. The results of this study indicate that customers who are unable to pay off their debts at maturity will be auctioned off their pawns as mentioned in Article 1155 of the Civil Code. The factors that affect debt collection at Pegadaian are due to obstacles in the implementation of debt collection, namely the lack of awareness of customers who neglect to pay their debts. Researchers provide recommendations to other prospective researchers to conduct more in-depth research on the issues raised in this thesis.

**Keywords**: Debt Collection; Pawn shops

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara-cara penagihan utang dan faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo akan dilakukan pelelangan terhadap barang gadainya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Adapun faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian adalah karena adanya kendala dalam pelaksanaan penagihan utang yaitu faktor kurangnya kesadaran nasabah yang lalai untuk membayar utangnya. Peneliti memberikan rekomendasi kepada calon peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah yang diangkat pada skripsi ini.

**Kata Kunci:** Penagihan Utang; Pegadaian

**PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya mempunyai hubungan satu sama lain dalam hal apapun, tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hubungan sesama manusia seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum yang timbul karena kepentingan satu sama lain baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kelompok. Di dalam bidang ekonomi, ada orang yang kaya dan ada yang miskin. Di bidang ilmu pengetahuan, ada orang yang ahli dan ada pula orang yang awam.

Kehidupan masyarakat pada umumnya masih melakukan kegiatan gotong royong, tolong menolong, pinjam meminjam barang, serta hutang piutang yang saat ini masih berkembang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini, perekonomian semakin sulit, namun kebutuhan yang semakin banyak dan ditambah lagi dengan harga barang-barang yang semakin melonjak tinggi sehingga masyarakat sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun yang menjadi kendala, seseorang kadang tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya.

Hutang piutang dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”. [[1]](#footnote-2)

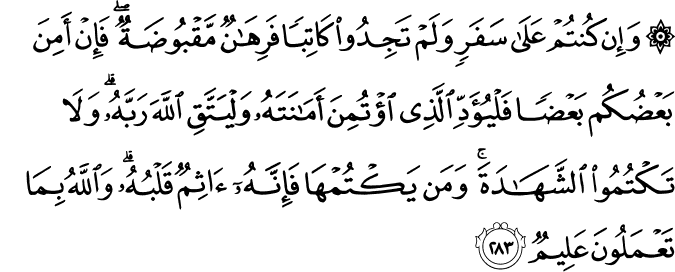
Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai sebagaimana yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang berbunyi:

“Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu benda bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang”

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang (debitur) kepada yang memberi hutang (kreditur). Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullahh sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.[[2]](#footnote-3)

Dalil yang menunjukkan bolehnya gadai:

Firman Allah Ta’ala:



Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian” (QS. Al-Baqarah: 283).

Berdasarkan konsep rahn, barang yang berharga diagunkan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Dalam hal ini debitur atau orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya, hasil dari penjualan agunan tersebut dijadikan sebagai sumber pelunasan utang. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur.[[3]](#footnote-4)

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis yuridis cara-cara penagihan utang di Pegadaian dan faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis cara-cara penagihan utang di Pegadaian dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bentuk model evaluasi diri dari pihak yang berkepentingan, sehingga dapat dipergunakan sebagai informasi dan bahan kajian. Dan juga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam kajian kepustakaan, untuk dijadikan bahan pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui cara-cara penagihan utang di Pegadaian, sehingga dapat dimengerti mengenai pengaturan-pengaturan yang terdapat didalamnya dan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Peneliti mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, dipaparkan secara detail, kemudian memberikan solusi terhadap penelitian yang dilakukan. Untuk menunjang penelitian normatif tersebut, peneliti juga mencari data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan masalah peneliti. Lokasi penelitian yang digunakan peneliti guna mendukung dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah salah satu Cabang Pegadaian di Kabupaten Wajo yaitu Cabang Pegadaian Pasar Mini Sengkang dan untuk penelitian pustaka di Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia. populasi biasanya besar dan luas, maka tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi akan tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil, tidak ada peraturan mutlak yang menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam masalah utang piutang di Pegadaian. Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu Pegadaian Pasar Mini Sengkang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

**PEMBAHASAN**

1. **Analisis Yuridis Cara-Cara Penagihan Utang Di Pegadaian**

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Di samping itu, di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu:

“Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firman Rasyid selaku pimpinan Cabang Pegadaian Pasar Mini, menyebutkan bahwa jangka waktu peminjaman dana kepada nasabah yang menggadaikan barangnya yaitu 4 bulan.[[4]](#footnote-5) Jika sampai batas waktu kredit nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kredit, barang jaminan akan dilelang pada bulan ke 5. Pelelangan barang gadai dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh oleh Pegadaian. Pelelangan dilaksakan oleh Pegadaian sendiri (Stastsblad Tahun 1920 No. 133). Barang gadai akan dieksekusi atau dilelang di Cabang Pegadaian masing-masing. Tanggal pelelangan diumumkan melalui papan pengumuman dan media radio. Dalam hal barang jaminan telah dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman + sewa modal dan biaya lelang. Menurut salah satu nasabah Pegadaian, apabila ada kendala untuk mengembalikan membayar kredit tepat pada waktunya, maka dapat diperpanjang dengan cara dicicil atau digadai ulang. Cara ini secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.

Ketentuan yang ada dalam pasal 1150 KUH Perdata adalah mengatur mengenai pengertian gadai, bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah hak kebendaan yang diberikan sebagai jaminan pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur.

Kreditur yang memberikan utang kepada debitur sebagai hasil dari digadaikannya suatu barang tidak perlu merasa khawatir apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Barang yang dijadikan objek gadai wajib berada di tangan pihak kreditur, sehingga ketika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya, objek gadai berhak untuk diambil pelunasannya sebagai penggantian utang yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak debitur. Penggantian tersebut dilakukan dengan menjual objek gadai, kemudian dari hasil penjualan itu dapat diambil pelunasan oleh pihak kreditur. Mengenai penjualan objek gadai sebagai pelunasan utang, Salim HS mengemukakan pendapatnya:

“Debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan yang dibuat antara kreditur dengan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh debitur.”

Debitur yang lalai dalam melasanakan kewajibannya, mengakibatkan barang yang dijadikan jaminan gadai akan dilelang atau dijual oleh kreditur. Lelang terhadap barang gadai diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata dan Pasal 1156 KUH Perdata.

Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Apabila oleh para pihak tidak telah dilakukan perjanjian lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.”

Pasal 1156 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, si berpiutang dapat dituntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam Pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama.

Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah.”

Pegadaian selaku kreditur separatis dapat melakukan eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan lelang secara umum tanpa meminta persetujuan eksekusi kepada pengadilan negeri. Parate eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Jadi dapat dikatakan bahwa parate eksekusi ialah kewenangan yang dimiliki oleh kreditur untuk mengeksekusi hak tanggungan secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan. Pengaturan parate eksekusi dalam gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditetukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut.” Apabila barang yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak maka gadai yang akan dipakai, maka kreditur pemegang gadai sehubungan dengan masalah pelunasan utang akan memiliki hak parate eksekusi sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1155 KUH Perdata. Hak ini sepanjang tidak diperjanjikan lain lahir demi undang-undang sejak debitur wanprestasi. Dalam parate eksekusi kreditur diberi wewenang untuk menjual benda jaminan dimuka umum dengan memperhatikan kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku. Untuk keperluan menjual benda jaminan tidak diperlukan adanya title eksekutorial, kreditur tidak memerlukan bantuan Pengadilan. Apabila objek jaminan gadai ini adalah berbentuk saham maka saham tersebut akan dijual ke pasar bursa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) dilakukan tidak dihadapan pejabat lelang atau tidak melalui pengadilan. Pelaksanaan lelang dilakukan di kantor PT. Pegadaian (Persero) dibawah tanggung jawab kepala PT. Pegadaian (Persero). Dasar kewenangan PT. Pegadaian (Persero) untuk melaksanakan lelang atas barang jaminan gadai berdasarkan pasal 18 sampai 21 Pandhuis Reglement Staatsblad 1928 Nomor 81 yang diadopsi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Staatsblad 1926 Nomor 133, Staatsblad 1921 Nomor 29, Staatsblad 1933 Nomor 341 dan Staatsblad 1935 Nomor 453.

1. **Faktor Yang Mempengaruhi Penagihan Utang Di Pegadaian**

Tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah 20 hari. Misalnya, tanggal jatuh temponya 5 maret 2020, maka tanggal pelelangan barang jaminan dilakukan pada 25 maret 2020. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk melunasi pinjaman pokok dan bunga kredit. Menurut Bapak Firman Rasyid, biasanya pihak Pegadaian akan menghubungi nasabah beberapa hari sebelum barang jaminannya jatuh tempo. Faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian adalah karena adanya kendala dalam pelaksanaan penagihan utang yaitu kurangnya kesadaran nasabah atau lalai untuk membayar utangnya. Nasabah yang tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Pegadaian untuk melunasi utangnya, maka barang nasabah tersebut akan di lelang. Ketentuan lelang diatur di dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Cara melakukan penjualan barang gadai adalah dilakukan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan persyaratan yang lazim. Untuk barang-barang dagangan atau efek, maka penjualan dapat dilakukan ditempat itu juga asalkan ada perantaraan 2 makelar yang ahli dalam bidang itu. Ketentuan tentang pelelangan barang jaminan juga diatur dalam Pasal 3.9.2.9. NBW Belanda. Pasal itu berbunyi:

“Apabila yang berutang lalai melunasi hutangnya, maka pemegang berhak untuk menjual bendanya dan mengambil pelunasannya.”

Menurut ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, somasi atau peringatan diberikan manakala dalam perjanjian antara kreditur atau debitur tidak disertakan waktu jatuh tempo.

Yang menjadi kendala, setelah diberikan somasi nasabah tetap tidak mengindahkan atau tak kunjung memenuhi peringatan yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepadanya untuk melunasi utangnya. Somasi tersebut dilakukan untuk memerintahkan kepada debitur atau nasabah segera melaksanakan prestasinya, apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Peringatan tidak lagi dibutuhkan, manakala dalam suatu perikatan suatu perikatan sudah tertera waktu jatuh tempo. Debitur yang tidak kunjung melaksanakan prestasinya melewati waktu jatuh tempo, maka dianggap telah wanprestasi.

Di dalam praktiknya bahwa penerima gadai tidak memberikan teguran kepada debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya. Ketentuan ini hanya terhadap benda gadainya yang nilainya sangat kecil, tetapi jika uang gadainya besar, maka terhadap debitur yang lalai, maka pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu kali. Apabila somasi itu tidak diindahkan, maka penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.

Setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.

Jika setelah dilelang terjadi kelebihan maka uang kelebihan dapat diambil sesudah pelelangan. Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama 1 (satu) tahun setelah tanggal lelang. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil maka uang kelebihan (kadaluarsa) akan menjadi milik perusahaan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis yuridis cara-cara penagihan utang di Pegadaian adalah bahwa nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo maka akan dilakukan pelelangan terhadap barang gadainya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1155 KUHPerdata. Penjualan barang gadai tersebut dimaksudkan untuk menutupi utang nasabah beserta dengan bunganya, dan biaya pelaksaan lelang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian adalah karena adanya kendala dalam pelaksanaan penagihan utang yaitu kurangnya kesadaran nasabah atau lalai untuk membayar utangnya, sehingga nasabah dikatakan wanprestasi. Karena nasabah dianggap wanprestasi, maka pihak Pegadaian melakukan eksekusi terhadap barang yang digadaikan nasabah untuk melunasi utangnya, adapun jika ada kelebihan sisa hasil lelang akan dikembalikan ke nasabah. Sebaiknya masyarakat yang ingin meminjam dana di Pegadaian, lebih baik terlebih dahulu memperhitungkan apakah benar-benar mampu untuk menebus barang jaminannya daripada barangnya tersebut dilelang (kecuali dalam keadaan yang mendesak). Disarankan kepada nasabah Pegadaian agar dapat melakukan kewajiban pembayaran pinjaman pada tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan diharapkan kepada Pegadaian di seluruh Indonesia dapat terus berbenah dan memberikan edukasi kepada nasabahnya tentang cara penyelesaian masalah terkait utang piutang di Pegadaian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

**REFERENSI**

* **Al-Qur’an**

Departemen Agama RI, 1994**, Al-Qur’an dan Terjemahannya**, PT. Kumudashoro Grafindo, Jakarta

* **Buku**

Chairuman Pasaribu dan Suhrawati K.Lubis, 1996, ***Hukum Perjanjian dalam Islam***, Sinar Grafika, Jakarta

Imam Mustofa, 2016, ***Fiqih Mua’malah Kontemporer****,* Jakarta, Rajawali Pers

Sutan Remy Sjahdeini, 2014, ***Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya****,* Kencana, Jakarta

* **Wawancara**

Wawancara, Firman Rasyid, Kepala Cabang Pegadaian Pasar Mini Sengkang, 19 Maret 2021

1. Chairuman Pasaribu dan Suhrawati K.Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, h. 136 [↑](#footnote-ref-2)
2. Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mua’malah Kontemporer,* Jakarta, Rajawali Pers,h. 193. [↑](#footnote-ref-3)
3. Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya,* Jakarta, Kencana, h. 364 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wawancara, Firman Rasyid, Kepala Cabang Pegadaian Pasar Mini Sengkang, 19 Maret 2021 [↑](#footnote-ref-5)